



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH  
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI IX DPR RI  
DENGAN ASOSIASI PEKERJA KESEHATAN SELURUH INDONESIA  
(APKSI)**

- Tahun Sidang : 2024-2025  
Masa Persidangan : II  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari & Tanggal Rapat : Senin, 10 Maret 2025  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI  
Acara : Permasalahan pekerja kesehatan, di antaranya tenaga honorer yang tidak masuk dalam *database* BKN di sektor kesehatan, khususnya terkait penyelesaian status kepegawaian mereka.
- Waktu : Pukul 12.30 s.d. 13.14 WIB  
Ketua Rapat : drg. Putih Sari (Wakil Ketua Komisi IX DPR RI/ F-P. GERINDRA)  
Sekretaris Rapat : Ida Nuryati, S.Sos., M.A. (Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI)  
Hadir : **A. PIMPINAN DAN ANGGOTA:**  
12 orang Anggota hadir dari 43 orang Anggota dengan rincian sebagai berikut:

**I. PIMPINAN:**

1. drg. Putih Sari (Wakil Ketua Komisi IX DPR RI/ F-P. GERINDRA)
2. Dr. Hj. Nihayatul Wafiroh, M.A (Wakil Ketua Komisi IX DPR RI/ F-PKB)

**II. ANGGOTA:**

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA  
PERJUANGAN (F-PDI PERJUANGAN)**

4 orang Anggota dari 7 Anggota

1. Dr. H. Edy Wuryanto, S.KP.,M.Kep
2. Dr. Sihar P.H. Sitorus, BSBA., M.B.A.
3. Obet Rumbruren
4. Eko Kurnia Ningsih

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA  
(F-P. GOLKAR)**

0 orang Anggota dari 7 Anggota

**FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA  
RAYA (F-P. GERINDRA)**

0 orang Anggota dari 5 Anggota

**FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT  
(F-P. NASDEM)**

2 orang Anggota dari 4 Anggota

1. Irma Suryani, S.E., M.M.
2. Nafa Urbach

**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA  
(F-PKB)**

0 orang Anggota dari 4 Anggota

**FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera  
(F-PKS)**

1 orang Anggota dari 4 Anggota

1. H. Alifudin, S.E., M.M

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL  
(F-PAN)**

0 orang Anggota dari 4 Anggota

**FRAKSI PARTAI DEMOKRAT  
(F-P. DEMOKRAT)**

3 orang Anggota dari 3 Anggota

1. dr. Hj. Cellica Nurrachadiana
2. Dra. Lucy Kurniasari
3. Tutik Kusuma Wardhani, S.E., M.M.,  
M.Kes.

**B. ASOSIASI PEKERJA KESEHATAN SELURUH  
INDONESIA (APKSI)**

1. Sepri Latifan
2. Saharuddin
3. Ardi Sulistiono
4. Tengku Dayu
5. Elda Meilinda, A.Md.Keb
6. Devi Triani
7. Diah Nahdiratus Solihah
8. Ferry Fadli

**JALANNYA RAPAT:**

**(RAPAT DIBUKA PUKUL 12.30 WIB)**

**KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX):**

Sambil jalan bisa, ya? Ya, baik, terima kasih.

*Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
Selamat siang,  
Salam sejahtera untuk kita semua,*

**Yang kami hormati, Bapak/Ibu Komisi IX DPR RI,  
Yang kami hormati, Asosiasi Pekerja Kesehatan Seluruh Indonesia atau  
APKSI, ya,  
Pak Ketua beserta seluruh jajaran, dan yang hadir semuanya.**

Hari ini kita sesuai dengan surat yang masuk, ya, ini diagendakan untuk Rapat Dengar Pendapat Umum atau Audiensi dengan APKSI, ya, APKSI nyebutnya ya, oke, APKSI (Asosiasi Pekerja Kesehatan Seluruh Indonesia) terkait dengan tenaga honorer, ya.

Karena ini waktu sudah menunjukkan 12.30, mungkin kami tawarkan sampai dengan jam 13.00, ya, karena ada kegiatan yang lain, ya. Jadi, mungkin bisa disampaikan langsung saja secara detail dari APKSI apa-apa yang perlu disampaikan kepada Komisi IX DPR RI. Untuk itu, kami persilakan, ya, untuk mempersingkat waktu, Ketua APKSI untuk bisa menyampaikan dan menjelaskan ya dari pertemuan ini.

Silakan.

**PERWAKILAN ASOSIASI PEKERJA KESEHATAN SELURUH INDONESIA  
(SEPRI LATIFAN):**

*Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
Salam sejahtera bagi kita semuanya,  
Om swastiastu,  
Namo buddhaya,  
Salam kebijakan,  
Salam sehat,  
Rahayu, rahayu, rahayu.*

Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan, Bapak/Ibu, semua Anggota Komisi IX DPR RI. Selamat menjalankan ibadah puasa

bagi yang menjalankan, mohon maaf lahir dan batin. Perkenalkan, saya Sepri Latifan, kebetulan perwakilan dari Asosiasi Pekerja Kesehatan Seluruh Indonesia atau APKSI. Kita bersama ada Bang Saharuddin, ada Mbak Elda, dan dari teman-teman dari Pandeglang, Provinsi Banten.

Sebetulnya, pertemuan kita dengan Komisi IX ini udah yang kesekian kalinya. Mungkin udah enam apa tujuh kali RDPU, audiensi masih dengan isu yang sama. Jadi, mudah-mudahan Bapak/Ibu tidak bosan mendengarkan aspirasi yang kita bawa, tidak bosan mendengarkan keluhan, keresahan, kegelisahan dari teman-teman pekerja kesehatan kita, yang mana ini teman-teman yang bekerja di sektor kita.

Jadi, Bapak/Ibu, sejak terbitnya kebijakan penghapusan atau penataan tenaga non-ASN, amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, jadi, implementasi dari amanat undang-undang tersebut perlu rasanya minta pengawalan, pengawasan dari Bapak/Ibu yang ada di Komisi IX yang bermitra dengan Kementerian Kesehatan dan juga Ketenagakerjaan.

Berikutnya, Bapak/Ibu, jadi, latar belakang kita datang ke sini ya diantaranya untuk mengawal penataan non-ASN. Setelah itu kita juga meminta kepada Komisi IX untuk mengawal, mengawasi, bagaimana teman-teman kita yang di luar dari *database* BKN. Pemerintah melalui Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara atau BKN untuk sementara hanya menyelesaikan tenaga non-ASN yang masuk pangkalan data pemerintah, kurang lebih angkanya ada 1,7 juta.

Lalu, bagaimana teman-teman kita pekerja kesehatan yang sudah mengabdikan mungkin jauh lebih lama masa pengabdian mereka ketimbang yang terdata? Tapi kenapa mereka tidak terdata? Ini dua persoalan yang berbeda. Ketika mereka yang bekerja mungkin dua atau tiga tahun, sumber penggajian mereka selama ini mungkin dari APBD atau APBN mereka masuk ke dalam database BKN, masuk dalam kriteria mereka di data oleh pemerintah melalui BKN, tetapi teman-teman yang BLUD, yang masa pengabdian mereka jauh lebih lama bahkan ada yang belasan, puluhan tahun mereka tidak masuk dalam database BKN. Ini yang selama ini kita coba rangkul, kita inventarisir jumlah mereka berapa, ternyata jumlah mereka cukup banyak. Jadi, jangan sampai teman-teman kita ini pekerja kesehatan yang sudah belasan atau puluhan tahun mengabdikan, mereka tertinggal dalam penataan non-ASN.

Jadi, mungkin Bapak/Ibu juga sudah ada yang mengetahui mungkin, ya, bahwasanya teman-teman yang tidak masuk pangkalan data itu sudah mulai diberhenti-berhentiin dari tempat kerjanya. Jadi, ini sangat kita sayangkan. Jadi, di sini mungkin kita datang untuk meminta, mendorong adanya solusi konkret bagi non-ASN atau honorer non-*database* agar mendapatkan kesempatan yang sama dengan teman-teman yang terdata.

Berikutnya, meminta pengawalan terkait kejelasan dan kepastian hukum bagi pengangkatan CASN yang tertunda mengingat banyak peserta yang telah meninggalkan pekerjaannya. Mungkin ini isu yang baru, ya. Kementerian PANRB mengeluarkan surat edaran, itu teman-teman CASN, baik untuk PPPK atau PNS yang lolos dalam pengadaan tahun 2024, itu pengangkatannya ditunda, ditundanya cukup lama, Bapak/Ibu. Ini khawatirnya ini mereka tidak mampu, atau sedangkan mereka teman-teman ini sudah keluar dari kerja sebelumnya, sudah *resign* dari kerja, atau diminta untuk mengundurkan diri dari kerjaan sebelumnya, atau bahkan kalau PPPK, *batch* tahun depan itu sudah masuk dalam usia pensiunnya mereka. Ini penundaan, mungkin, ini kebijakan yang perlu dikaji ulang oleh Kementerian PAN-RB.

Mungkin sekilas dari saya untuk pembukaan, demikian. Nanti bisa dibantu dan ditambahkan oleh teman-teman di sini. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih, Bapak/Ibu atas waktu dan kesempatan yang sangat luar biasa ini. Mudah-mudahan APKSI bisa bersinergi untuk mengawal kebijakan, mengawal penataan non-ASN, mengawal kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan pekerja kesehatan. Saya akhiri.

*Wabillahi taufik wal hidayah,  
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX):**

*Walaikumsalam.*

Ada yang masih mau ditambahkan? Silakan.

**PERWAKILAN ASOSIASI PEKERJA KESEHATAN SELURUH INDONESIA:**

Izin.

**Pimpinan dan Bapak/Ibu semuanya yang saya hormati.**

Saya hanya ingin menyampaikan, karena waktu yang sangat singkat, intinya saja. Jadi, semangat pemerintah ini untuk mensejahterakan teman-teman yang sudah bekerja di instansi pemerintah, baik rumah sakit dan puskesmas, itu dengan diterbitkannya aturan PPPK. Nah, aturan PPPK ini kan seharusnya untuk honorer yang sudah bekerja, karena honorer banyak yang umurnya sudah di atas 35 dan tidak bisa mendaftar menjadi CPNS, tapi sekarang ini dibalik, Bapak/Ibu, malah jadi PPPK itu dibuka untuk formasi umum, sehingga kalau kita berbicara tentang penyelesaian tenaga honorer, ini tidak akan selesai kalau apa yang menjadi semangat pemerintah sebelumnya itu memang tidak dilaksanakan.

Nah, itu yang mungkin yang menjadi, saya mohon, Bapak/Ibu semua untuk bisa mengawal, karena jujur, Bapak/Ibu, teman-teman kami ini yang udah umur di

atas 35 mereka tidak bisa ngapa-ngapain. Mau daftar PNS enggak bisa, mau daftar PPPK sudah ditempatin sama dengan teman-teman yang umum, dengan teman-teman yang baru lulus, ya toh otomatis pasti mereka lebih jago ketika kita berbicara terkait kompetensi soal-soal. Nah, ini yang menjadi pertimbangan, tapi ketika berbicara ke potensi di lapangan, pasti teman-teman sudah berpengalaman layak bisa menjadi lebih unggul.

Nah, mohon, Bapak/Ibu, supaya ini menjadi pengawalan. Jadi, semangat penyelesaian PP 18 2018 itu bisa kembali ke tempatnya. Jangan lagi dibolak-balik untuk diberikan kepada teman-teman yang baru lulus, biarkanlah teman-teman yang baru lulus ini diberikan untuk formasi PNS.

Mungkin itu saja, terima kasih.

**KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX):**

Ya, ada lagi?

**DPD KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN (ELDA MEILINDA, A.Md.Keb):**

Baik.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Izin perkenalkan, Bu, nama saya Elda, saya perwakilan dari DPD Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten. Di sini saya membawa aspirasi dari teman-teman daerah Banten.

Itu mereka mempertanyakan, Bu, kenapa untuk tahap satu tes CPNS dan PPPK tahun 2023, kenapa Men-PANRB itu mengundur, sedangkan penataan non-ASN itu tahun 2023 itu harus selesai, gitu. Ini teman-teman di daerah, terus terang, mendesak minta kepada pemerintah pusat untuk segera jelas untuk regulasinya, karena nanti untuk yang paruh waktu ini ke depannya seperti apa, gitu, karena walaupun yang tahap satu ini diundur-undur kami yang nanti notabenenya ke paruh waktu ini pasti mundur.

Jadi, bagaimana penataan ini mau selesai kalau misalkan untuk tahap satu aja terus diundur-undur baik itu CPNS maupun PPPK? Karena dalam penataannya itu sudah jelas menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, yang disahkan oleh Pak Presiden, yaitu harus selesai di tahun 2024, tapi kenapa sekarang udah 2025 kejelasannya itu masih bias kalau menurut kami di daerah? Jangan sampai kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat ini membuat blunder pemerintah di daerah, karena kami, khususnya honorer, baik itu dari nakes, guru, maupun teknis, pasti dibuat bingung dengan kebijakan-kebijakan yang terus

berubah-ubah. Jadi, mohon untuk pengawalannya juga, supaya kami di daerah ini tidak bingung.

Terkait untuk yang sudah lolos di tahap satu, itu udah ada surat edaran untuk CASN di bulan Oktober dan untuk PPPK di bulan Maret, berarti kami yang untuk paruh waktu ini di bulan apa? Itu pertanyaan kami, karena kami minta kejelasan status, walaupun misalkan kami diparuhwaktukan, tapi paruh waktukan ke bulan apa dan untuk penataan gajinya itu seperti apa? Karena keluhan di daerah itu terkait PAD, Bu, khususnya di Kabupaten Pandeglang, PAD kami sangat kecil.

Jadi, walaupun misalkan kami diangkat untuk paruh waktu, tetap saja cuma mendapatkan NIP, tapi tidak dengan status kesejahteraan kami yang sudah sesuai Surat Edaran Kemendagri, bahwa di situ ada belanja jasa. Sedangkan di Kabupaten Pandeglang sendiri sudah melebihi untuk belanja pegawainya sendiri udah 35%-an dan mohon ini untuk pengawalan juga. Mohon untuk pemerhati juga untuk Kabupaten Pandeglang, tolong lah, jadi, supaya permasalahan ini merata, gitu, bisa ada solusi.

Jangan informasi untuk ngasih kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan tapi blunder semua, karena kami yang di daerah, terus terang, bingung. Apalagi dengan berita-berita di media yang membikin info-info ini, terus terang, jadi bias, ya. Yang tadinya kita percaya dengan pemerintah pusat bahwa akan diselesaikan di tahun ini, akhirnya ada informasi lagi di tahun 2026. Jadi bagaimana ini yang harus kami pegang?

Cukup sekian.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX):**

*Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh,*

Sudah cukup, ya? Ada lagi yang masih? Cukup, baik.

Terima kasih atas penyampaiannya. Ya, ini memang permasalahannya cukup panjang sebenarnya, ya, terkait dengan nasib dari tenaga honorer kesehatan kita, tapi memang walaupun sudah ada apa *updating* lah, ya, beberapa terakomodir dalam proses perekrutan ASN yang berjalan, tapi memang karena memang formatur dan lain sebagainya untuk bisa mengakomodir seluruhnya, mungkin ini kami juga akan melihat prosesnya lebih lanjut ke depannya, tapi saya mungkin akan mempersilakan terlebih dahulu dari Bapak/Ibu Anggota.

**F-PKB (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A.):**

Ibu, interupsi sebentar.

Saya hanya ingin sekadar tanya, sudah ke Komisi II, belum?

**KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX):**

Oh iya.

**F-PKB (Dr. Hj. NIHAYATUL WAFIROH, M.A.):**

Karena sebenarnya Men-PANRB itu wilayahnya Komisi II. Jadi, terkait pengangkatan, terkait ASN, lalu terkait PPPK itu di Komisi II, walaupun terkait dengan kesehatan, itu kaitannya dengan Men-PANRB itu mitranya Komisi II. Jadi kan sekarang tersentral semuanya kan yang untuk pengangkatan dan sebagainya. Jadi, saya sarankan untuk ke Komisi II yang menjadi mitra langsung dari Men-PANRB, begitu.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX):**

Iya, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu. Silakan.

**PERWAKILAN ASOSIASI PEKERJA KESEHATAN SELURUH INDONESIA (SEPRI LATIFAN):**

Iya, baik. Terima kasih, Pimpinan.

Untuk tahun 2025 memang belum pernah ke Komisi II, tapi kita sudah mengusulkan sudah mengajukan surat permohonan, tapi di tahun 2023, 2024 kita sudah ke Komisi II. Kita juga sebelumnya, terakhir, pertengahan tahun kemarin 2024 kita ke Komisi II, kita juga menyampaikan bagaimana nasib teman-teman kita yang tidak masuk dalam *database* BKN.

Ini kita juga ke Komisi IX, karena kita meminta Komisi IX karena bermitra dengan Kementerian Kesehatan untuk juga bersinergi dengan Kementerian Kesehatan. Bahwasanya bagaimana teman-teman yang tidak masuk dalam pangkalan data pemerintah, yang tidak masuk dalam pangkalan data BKN, begitu, Bapak/Ibu.

Mungkin, sedikit tambahan, Pimpinan.

**KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX):**

Iya.

**PERWAKILAN ASOSIASI PEKERJA KESEHATAN SELURUH INDONESIA (SEPRI LATIFAN):**

Terkait tunjangan dan pendapatan pekerja kesehatan, nakes, yang berbeda-beda di setiap daerah. Ini yang enggak, mungkin ini di setiap daerah itu perlu, perlu ada kebijakan yang mengatur di tingkat nasional, di pusatnya, begitu. Jadi, implementasi di daerahnya jadi sama, begitu.

Terima kasih, Pimpinan.

**KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX):**

Iya, terima kasih.

Silakan, saya lanjut ke Anggota, Bu Irma.

**F-P. NASDEM (IRMA SURYANI, S.E., M.M.):**

Iya terima kasih, Pimpinan.

Saya ingin menyampaikan bahwa terkait dengan penyampaian yang Bapak sampaikan tadi, bahwa honor nakes di daerah, ya, yang Bapak persoalkan. Pak, kalau nakes di daerah itu, itu tanggung jawab pemda sebenarnya. Kan banyak tuh yang honda-honda dan lain sebagainya itu, ya, itu sebenarnya bukan tanggung jawab pusat, tanggung jawab daerah itu. Jadi, karena otonomi daerah sudah mengatur itu. Jadi, pusat enggak bisa cawe-cawe ke sana. Karena itu, Bapak saya sarankan untuk menemui bupati, wali kota, atau gubernur untuk masalah itu.

Karena memang, akar permasalahannya dulu, ya, banyak sekali tenaga honorer itu yang menjadi alat politik. Ya, karena mau pilkada itu banyak sekali itu bupati, gubernur, wali kota yang kasih iming-iming kan untuk bisa nanti dipekerjakan di mana, di mana, di mana, akhirnya ngangkat sendiri-sendiri. Habis itu, begitu sudah diangkat, kebingungan sendiri lagi untuk bayar gajinya. Sampai ada yang di gaji cuma 300.000 sebulan, 500.000 sebulan, kan gitu. Ini masalahnya udah dari dulu dan kami dari Komisi IX sudah menyampaikan berkali-kali, ya, kepada pemerintah daerah ketika kami kunjungan kerja. Harusnya itu pemerintah daerah yang bertanggung jawab, karena ada otonomi daerah, itu enggak bisa juga, ya, semua ditimpakan ke pusat, enggak bisa juga.

Kalau soal PHK, ya, itu bisa ke Komisi IX, karena itu bidang ketenagakerjaan gitu. Jadi, mestinya harus tahu prosedurnya seperti apa, supaya apa yang ingin Bapak sampaikan itu bisa diselesaikan dengan baik, karena akar

permasalahannya ada di sana, ada di daerah, gitu, bukan di pusat. Kami sebagai Anggota DPR ini enggak bisa ngatur-ngatur bupati, gubernur, wali kota itu enggak bisa, enggak sampai ke sana tangannya. Bukan enggak sampai, memang enggak boleh, karena ada otonomi daerah, gitu. Nanti Menteri Dalam Negeri yang akan bicara dengan mereka, karena mereka di bawah Kementerian Dalam Negeri.

Gitu, ya, Bapak/Ibu, ya. Jadi, kita Komisi IX itu memahami apa yang Bapak/Ibu sampaikan dan juga mendorong ke Kementerian Kesehatan, selalu, setiap RDP kami selalu menyampaikan masalah-masalah itu kepada Pak Menteri untuk melihat kembali bagaimana mereka bisa berkomunikasi dengan pemda daerah, ya dinas kesehatannya, dan lain sebagainya, selalu, tapi memang otoritasnya ada di sana, bukan di kita, gitu lo. Ya, tapi enggak apa-apa, kami dari Komisi IX ini Pimpinan juga pastinya akan juga menyampaikan kepada komisi terkait, kepada menteri terkait, ya, mendorong apa yang Bapak/Ibu sampaikan, supaya nanti permasalahannya bisa diselesaikan secara komprehensif.

Tapi enggak boleh juga misalnya tadi Mbaknya ngomong, enggak percaya lagi dengan pemerintah, ya, enggak gitu juga kali, Mbak, ya, karena semuanya pasti ada prosedurnya. Enggak semua persoalan itu ditimpakan ke pemerintah pusat, karena pemerintah daerah juga harus punya tanggung jawab, karena yang bikin masalah tuh di sana gitu, lo. Ya, minta tuh pertanggungjawaban bupati, gubernur, wali kota. Jangan cuma bisa ngabisin APBN aja, APBD aja, tapi ketika ada persoalan, mereka lepas tangan, selalu lempar ke pusat. Nah, teman-teman juga enggak paham ke mana seharusnya meminta pertanggungjawaban, gitu, ya.

Mungkin itu saja, Pimpinan, terima kasih.

*Wabillahi taufik wal hidayah,  
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX):**

*Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Mungkin nanti bisa diperjelas ini maksudnya tunjangan dalam satu daerah yang berbeda-beda atau, tadi, kalau antardaerah memang enggak bisa. Itu menjadi bagian otonomi daerahnya masing-masing, tapi kalau ada ketidakadilan dalam satu daerah dengan mungkin level jabatan yang sama, nah, itu harusnya memang ada standarnya.

Selanjutnya Pak Zainul, silakan.

**F-PKB (ZAINUL MUNASICHIN, M.A.):**

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**Yang saya hormati, Pimpinan Komisi IX,  
Bapak/Ibu Perwakilan dari Asosiasi Pekerja Kesehatan Seluruh Indonesia.**

Pertama, tentu kami sangat memahami problem yang dihadapi oleh Bapak/Ibu semuanya ini menyangkut soal pangkalan data, ya. Pangkalan datanya memang tunggal adalah yang digaji melalui APBN atau APBD, sementara pangkalan data untuk honorer yang di luar, itu kan memang tidak terangkut kan begitu. Pertanyaannya kenapa, tentu itu karena nanti itu kebijakannya di Kemen-PANRB, kenapa pangkalan data yang diambil hanya yang, yang digaji melalui skema APBN begitu.

Nah, yang kedua, kami Komisi IX, kami domainnya adalah menyangkut soal hubungan industrial. Jadi, antara pekerja dengan pemberi kerja yang nonpemerintah, Pak, iya. Kalau Bapak misalnya honorernya itu *outsourcing*, alih daya, nah, itu domainnya dari kita, tapi kalau pemberi kerja Bapak langsung pemerintah, baik pusat maupun daerah, itu domainnya dengan Komisi II dan Kemen-PANRB, Pak. Jadi, saya kira tapi tidak masalah, kan kita ini kan juga ada rapat koordinasi lintas komisi. Nanti mohon izin, Pimpinan Komisi untuk menyampaikan ini kepada Komisi II bahwa ada problem nih data PPPK dan data Calon ASN itu yang diangkat hanya sepihak yang digaji oleh APBN.

Saya kira mungkin begitu tanggapan dari saya. Terima kasih.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX):**

Terima kasih, Pak Zainul. Silakan, Pak Alifudin.

**F-PKS (H. ALIFUDIN, S.E., M.M.):**

*Bismillahirrahmanirrahim,  
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Terima kasih, Pimpinan, dan Teman-Teman Komisi IX, Para APKSI.

Ini mengenai honorer memang Men-PANRB dan pemerintah daerah itu berada di Komisi II, ya. Namun, tenaga kesehatannya ini ada di sini, di komisi. Memang dari aspirasi kami di dapil penuh, ya, banyak keluhan-keluhan agar honorer yang dijanjikan diangkat, ya, tidak jelas, gitu. Jadi, kita walaupun ini kita memfasilitasi, Bu, bagaimana bisa ada percepatan, lah, karena kasihan juga ya.

Saya pun juga dari Dapil Kalimantan Barat, teman-temannya minta (suara tidak jelas) dibantu, gitu, sehingga menjadi PPPK gitu, ya, atau menjadi ASN, ada kejelasan.

Mungkin itu dari saya, Bu, masukan kami. Kita fasilitasi lah yang bisa kita perjuangkan itu.

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX):**

Iya.

*Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.*

Cukup, Bapak/Ibu, ya.

Baik, jadi, memang ada hal-hal yang memang bisa Komisi IX ya, saya kira akan coba untuk bisa mengoordinasikan, ya, dengan pihak-pihak yang memang terkait, baik mungkin Kementerian Kesehatan, ya, karena memang apa pun upaya peningkatan derajat kesehatan itu enggak akan terlepas, ya, dari peran sumber daya manusia kesehatannya, gitu, ya.

Jadi, teman-teman dari tenaga kesehatan ini juga, saya kira, punya peran penting untuk bisa kita sama-sama mewujudkan derajat kesehatan bangsa Indonesia yang lebih baik ke depan. Tentu, apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman tenaga kesehatan, artinya pengabdian-pengabdian yang sudah dijalankan, ya, ini tentu kami ya mendukung untuk bisa mendapatkan tempat ataupun mungkin apresiasi yang sesuai, ya, dengan apa yang memang sudah dikerjakan. Hanya saja yang terkait dengan sistem, ya, sistem yang memang ada dengan status, tadi, honorer ya, apakah dia masuk *database* BKN ataupun yang tidak masuk dalam status *database* tadi, ya.

Untuk itu, mungkin bisa nanti disusulkan, ya, sebenarnya berapa banyak dari teman-teman nakes ini yang selama ini sudah memberikan pengabdiannya, tapi tidak masuk di dalam *database* itu. Berapa sih jumlahnya dan juga tadi terkait dengan peraturan yang baru, ya, status terkait dengan pengangkatan untuk CASN di 2024, kami juga ini karena memang baru sekali, ya, regulasinya baru keluar. Mungkin nanti kita coba komunikasikan juga dengan teman-teman yang ada di Komisi II untuk bisa diperhatikan lebih lanjut, karena memang dampaknya cukup luas, ya. Ini sebenarnya enggak cuma terkait dengan nakes tapi juga teman-teman guru dan lain sebagainya yang mengikuti proses CASN di 2024. Banyak mereka yang memang, tadi, sudah *resign* dari pekerjaannya, sudah tidak mempunyai status kepegawaian lagi. Nah, ini tentu akan mengganggu kesejahteraan.

Mungkin itu, atau mungkin ada hal yang mau masih dijawab dari apa yang tadi disampaikan oleh Bapak/Ibu Anggota? Silakan.

**PERWAKILAN ASOSIASI PEKERJA KESEHATAN SELURUH INDONESIA (SAHARUDDIN):**

Iya. Izin, Bapak/Ibu.

Jadi, sebenarnya, kalau berbicara terkait audiensi, teman-teman ini di APKSI sudah mempunyai jejaring di daerah. Kami punya pengurus di kabupaten, kota, dan provinsi. Seluruhnya kami arahkan untuk audiensi dengan pemangku kebijakan atau bupati atau wali kota dan gubernur, dan itu semuanya dilakukan Bapak/Ibu. Apa jawaban mereka adalah ke pusat. Kebijakan pusat. Itu yang selalu jawaban mereka.

Bahkan waktu ketika *database* BKN ini, kami sempat audiensi juga dengan Men-PANRB. Ada apa dengan pendataan ini? "Tenang saja, pendataan ini bukan untuk pengangkatan CASN," tapi sekarang dipakai, Pak, sehingga kami ini yang BLUD, teman-teman yang tidak masuk kategori tersebut kami diam saja fokus bekerja, tapi setelah ada aturan itu bahwa *database* BKN itu dipakai sebagai rujukan, sekarang kami enggak bisa tenang lagi, nih, Bapak/Ibu, karena teman-teman kami di daerah ada yang di-PHK kok, karena enggak termasuk *database* BKN tersebut. Sekarang ada Program MBG, ada Program CKG, siapa yang melaksanakan? Ya teman-teman ini di lapangan. MBG kami juga, Bapak/Ibu, itu. Jadi, kalau misalnya teman-teman di-PHK, gitu, ini kan kami berkurang lagi tenaganya, sudah pengabdianya tidak dianggap gitu, kemudian seperti itu.

Jadi, kami berharap di Komisi IX ini bisa, karena mungkin di dapil Bapak/Ibu, ya, kami mohon untuk dibantu lah kami koordinasi ke bupati, wali kota, gubernur itu, karena kami ini jujur Bapak/Ibu, cuti kami itu habis untuk hal seperti ini. Kami enggak pakai untuk keluarga, gitu. Kami ada 800.000 yang tidak masuk di data BKN itu, total seperti itu. Kalau misal ini di-PHK semua, kami mau ke mana, Bapak/Ibu? Umur teman-teman kami ada yang umur 50 tahun, 40 tahun, berarti enggak bisa kerja, gitu. jadi ini yang kami sampaikan Bapak/Ibu. Kalau misalnya teman-teman kami di umur 50 gitu, 40 tahun gitu, mereka enggak bisa kerja, gitu. Kalau di swasta kan enggak bisa, syarat swasta itu 27 tahun, 28 tahun, Bapak/Ibu.

**F-P. NASDEM (IRMA SURYANI, S.E., M.M.):**

Melalui Pimpinan.

**KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX):**

Silakan, Bu Irma.

**F-P. NASDEM (IRMA SURYANI, S.E., M.M.):**

Iya, gini lo, Dek, Komisi IX dari tadi udah bicara, kita kan memfasilitasi kalau itu terkait dengan PHK, pasti kami akan perjuangkan karena mitra Komisi IX,

Kementerian Tenaga Kerja, ya, toh? Enggak mungkin kami akan diam saja. Sudah benar, datang ke sini itu sudah benar.

Cuma tadi saya menyampaikan bahwa akar permasalahannya itu ada di pemda. Harusnya mereka bertanggung jawab, jangan ngomong "Itu pusat, itu pusat," gitu kan harusnya enggak begitu, karena kami sebagai Anggota DPR RI juga ngomong ke bupati, gubernur, wali kota itu juga enggak dianggap, kenapa? Karena kan mereka di bawah Kementerian Dalam Negeri.

Nah kita tetap akan memberikan *supporting* penuh, ya, kalau ada PHK-PHK itu pasti lah, karena itu Komisi IX ranahnya, tapi kalau yang Men-PANRB seperti yang tadi saya sampaikan dan teman-teman sampaikan, itu akan kita komunikasikan ke Komisi II, ke komisi-komisi terkait, gitu. Enggak bisa langsung kita ngomong, gitu, enggak bisa, karena itu mitra kerja komisi lain, tapi apa yang Dinda sampaikan, tadi semua yang disampaikan tadi, tentu akan menjadi pertimbangan kami untuk akan kami bantu, pasti itu, enggak mungkin enggak, karena kami sebagai wakil rakyat bertanggung jawab untuk itu. Nah, tetapi mesti dipahami bahwa ada prosedur, ada juga jalan yang memang harus kita enggak bisa ambil alih secara langsung, itu saja.

Jadi, jangan khawatir, kita pasti akan mem-*backup*, itu pasti, enggak mungkin enggak. Ya, sebagai wakil rakyat kita bertanggung jawab, apalagi terkait dengan mitra yang kami memang ada di Komisi IX, itu kita tahu, bahwa yang sudah 50 tahun ke atas itu kalau ikut ujian, terus kemudian berhadapan dengan anak-anak baru, pasti enggak akan lulus. Nah ini kan menjadi perhatian Komisi IX, udah *dower* mulut kita ini ngomong sama Kementerian Kesehatan soal itu, ya. Itu harus diperhatikan, tentu. Ke Kementerian Tenaga Kerja juga akan kita sampaikan, bahwa jangan sampai akan terjadi lagi PHK-PHK, gitu. Itu pasti, ya, tenang saja, kita pasti akan sampaikan, ya.

Jadi, tadi saya menyampaikan itu harus ke bupati, gubernur, wali kota, karena mereka yang punya masalah dan yang bikin masalah. Nah, kemudian akibatnya ke pusat, selalu bicara pusat, pusat, pusat. Kenapa? Ngeles, gitu ya. Jadi, kita akan tetap akan memfasilitasi, kok, walaupun bukan mitra kami, tetap akan kami fasilitasi ke komisi-komisi terkait.

Terima kasih, Pimpinan.

**KETUA RAPAT (drg. PUTIH SARI/WAKIL KETUA KOMISI IX):**

Iya baik, terima kasih. Cukup, saya kira, Bapak/Ibu.

Jadi, apa yang tadi sudah disampaikan, kami memahami ya hal-hal terkait dengan peluang, ya. Intinya kan peluang bagi mereka hari ini yang tidak masuk dalam *database* BKN ini untuk bisa diperhatikan ke depan. Tentu ini kami coba komunikasikan juga Kementerian Kesehatan, karena biar bagaimana pengguna,

*user*-nya adalah Kementerian Kesehatan, baik di fasilitas kesehatan rumah sakit maupun juga puskesmas yang ada di daerah-daerah, untuk juga mereka mendorong Kementerian Kesehatan berkoordinasi juga, saya kira, dengan Men-PANRB maupun juga dengan Kementerian Dalam Negeri, untuk mencari solusi lah, karena apalagi mereka-mereka yang memang sudah mengabdikan cukup panjang, puluhan tahun memberikan pengabdianannya, membantu, tentunya menolong pasien-pasien di fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada ini. Tentu ini menjadi *concern* Komisi IX, ya.

Saya kira itu dari apa yang sudah disampaikan dalam pertemuan ini. Kita coba nanti akan agendakan, mungkin, dengan Kementerian Kesehatan terkait dengan nasib para tenaga kesehatan honorer ini ataupun juga yang tadi sudah mengikuti proses pengangkatan CASN di tahun 2024 ini agar bisa ada solusi lebih lanjut. Kami, tentu, sangat dengan senang hati untuk bisa terus bersinergi dengan teman-teman APKSI ini untuk kita bisa mengawal isu-isu terkait dengan, baik kesehatan maupun juga nasib dari teman-teman tenaga kesehatan di lapangan, ya.

Saya kira, itu, Bapak/Ibu sekalian. Terima kasih, sekali lagi, atas aspirasi yang sudah disampaikan, masukan-masukannya. Ya, realita yang terjadi di lapangan hari ini, ini menjadi catatan penting untuk Komisi IX, dan akan kami jadikan bahan kami ya ke depannya untuk bisa mengagendakan rapat-rapat kerja dengan mitra-mitra kerja terkait, ya.

Saya kira itu, Bapak/Ibu semua. Sekali lagi, terima kasih. Dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah*, tentunya, pertemuan rapat kita pada hari ini bisa kita tutup, ya, walaupun ada data-data yang mungkin bisa disusulkan, silakan, ya dengan senang hati kami akan terima, ya, data-datanya.

Saya kira itu, terima kasih. Saya tutup.

*Wabillahi taufik wal hidayah,  
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.14 WIB)**

**a.n. KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT**

Ttd

**Ida Nuryati, S.Sos., M.A.  
NIP.197604011998032002**